Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah [lembaga pemerintah nonkementerian](https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_pemerintah_nonkementerian) di [Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang [Pertanahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Agraria) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan *Kantor Agraria*. BPN diatur melalui [Peraturan Presiden](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Presiden) Nomor 20 Tahun 2015. Pada masa pemerintahan [Presiden](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia) [Joko Widodo](https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo) fungsi dan tugas dari organisasi Badan Pertanahan Nasional dan Direktorat Jenderal [Tata Ruang](https://id.wikipedia.org/wiki/Tata_Ruang) [Kementerian Pekerjaan Umum](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Pekerjaan_Umum_dan_Perumahan_Rakyat_Indonesia) digabung dalam satu lembaga [kementerian](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian) yang bernama [Kementerian Agraria dan Tata Ruang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia). Atas perubahan ini sejak [27 Juli](https://id.wikipedia.org/wiki/27_Juli) [2016](https://id.wikipedia.org/wiki/2016) Jabatan Kepala BPN dijabat oleh [Menteri Agraria dan Tata Ruang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia)yaitu [Sofyan Djalil](https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan_Djalil).

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian penguasaan dalam hal ini kelembagaan. tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. ketika dalam naungan kementerian agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindaklanjuti dari struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kantah, namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen Agraria sampai ketingkat Kantah. disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional mengalami peubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya sangat pendek.

Untuk mengetahui perubahan tersebut di bawah ini adalah sejarah kelembagaan Badan Pertanahan Nasional:

### 1960–1970

**1960**

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih dikeluarkan oleh Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. kebijakan itu ditempuh oleh pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa transisi.

**1965**

Pada tahun 1965 agraria dipisah dan dijadikan sebagai lembaga yang terpisah dari naungan menteri pertanian dan pada saat itu menteri agraria dipimpin oleh R.Hermanses. S.H

**1968**

Pada tahun 1968 secara kelembagaan mengalami perubahan.pada saat itu dimasukan dalam bagian departemen dalam negeri dengan nama direktorat jenderal agraria. selama periode 1968 – 1990 tetap bertahan tanpa ada perubahan secara kelembagaan begitupula dengan peraturan yang diterbitkan. aa

### 1988–1990

pada periode ini kembali mengalami perubahan. lembaga yang menangani urusan agraria dipisah dari departemen dalam negeri dan dibentuk menjadi lembaga non departemen dengan nama badan pertanahan nasional yang kemudian dipimpin oleh Ir.Soni Harsono dengan catur tertib pertanahannya. pada saat itu terjadi perubahan yang signifikan karena merupakan awal terbentuknya badan pertanahan nasional.

### 1990–sekarang

**1990**

Pada periode ini kembali mengalami perubahan menjadi menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional yang masih dipimpin oleh Ir.Soni Harsono. pada saat itu penambahan kewenangan dan tanggung jawab yang harus diemban oleh badan pertanahan nasional.

**1998**

Pada tahun ini masih menggunakan format yang sama dengan nama Menteri Negara agraria/badan pertanahan nasional.perubahan yang terjadi hanya pada puncuk pimpinan saja yakni Ir.Soni Harsono diganti dengan Hasan Basri Durin.

**2002–2006**

tahun 2002 kemudian mengalami perubahan yang sangat penting.pada saat itu badan pertanahan nasional dijadikan sebagai lembaga Negara.kedudukannya sejajar dengan kementerian.pada awal terbentuknya BPN RI dipimpin oleh Prof.Lutfi I.Nasoetion, MSc.,Ph.D

**2006–2012**

pada tahun 2006 sampai 2012 BPN RI dipimpin oleh Joyo Winoto, Ph.D. dengan 11 agenda kebijakannya dalam kurun waktu lima tahun tidak terjadi perubahan kelembagaan sehingga tetap pada format yang sebelumnya.

**2012–2014**

Pada tanggal 14 Juni 2012 Hendarman Supandji dilantik sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) menggantikan Joyo Winoto.

**2014–sekarang**

Pada pemerintahan [Presiden](https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Indonesia) [Joko Widodo](https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Widodo) dibuat Kementerian baru bernama [Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia), sehingga sejak [27 Oktober](https://id.wikipedia.org/wiki/27_Oktober) [2014](https://id.wikipedia.org/wiki/2014), Badan Pertahanan Nasional berada di bawah naungan [Menteri Agraria dan Tata Ruang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia). Jabatan Kepala BPN dijabat oleh [Menteri Agraria dan Tata Ruang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agraria_dan_Tata_Ruang_Indonesia) yang dijabat oleh [Sofyan Djalil](https://id.wikipedia.org/wiki/Sofyan_Djalil).

Awal mulanya BPN yang berada di daerah mataram ini belum ada dikarenakan pada sebelum tahun 1996 pulau lombok ini masih belum ada kota mataram berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.228/Pem. 20/1/12 diadakan perubahan yakni peningkatan status Asisten Kedistrikan Gondang menjadi Kecamatan Gangga dan Kedistrikan Gerung dipecah menjadi Kecamatan Gerung dan Kecamatan Kediri. Dengan perubahan tersebut maka Kabupaten Lombok Barat terdiri dari 8 Kecamatan yakni;

* Kecamatan Ampenan,
* Kecamatan Cakranegara,
* Kecamatan Narmada,
* Kecamatan Tanjung,
* Kecamatan Gangga,
* Kecamatan Bayan,
* Kecamatan Gerung, dan
* Kecamatan Kediri.

Dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. 156/Pem.7/2/226 tanggal 30 Mei 1969 ditetapkan pemecahan dua kecamatan yakni Kecamatan Ampenan dan Kecamatan Cakranegara dengan mengambil beberapa desa dari dua Kecamatan tersebut untuk dijadikan Kecamatan Mataram, sehingga sampai saat itu Kabupaten Lombok Barat telah membawahi 9 Wilayah Kecamatan.

Pada tahun 1992 dibentuknya sebuah bangunan pemekaran di Kota Mataram dan di Lombok Barat yang dinamakan BPN pada setiap lokasi, BPN Kota Mataram ini memiliki luas 1498m2.